



# RENCANA AKSI 2020

---

Deputi Bidang Koordinasi  
Kedaulatan Maritim dan Energi

---

Kementerian Koordinator Bidang  
Kemaritiman dan Investasi

---

2020



## RENCANA AKSI KINERJA

Perjanjian Kinerja merupakan pernyataan komitmen yang merepresentasikan tekad dan janji untuk mencapai kinerja yang jelas dan terukur dalam rentan waktu satu tahun tertentu, dengan mempertimbangkan sumber daya yang dikelolanya. Adapun tujuan perjanjian kinerja adalah untuk :

1. Meningkatkan Akuntabilitas, Transparansi dan Kinerja Aparatur;
2. Komitmen antara penerima amanah dengan pemberi amanah;
3. Dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi; serta
4. Tolak ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur.

Deputi Bidang Koordinasi Kedaulatan Maritim dan Energi telah Menyusun draf Perjanjian Kinerja Eselon I, Eselon II, Eselon III ke bawah sampai level staf. Sampai dengan awal tahun, belum dapat dilakukan penandatanganan Perjanjian Kinerja dikarenakan ada perubahan nomenklatur. Berdasarkan draf Perjanjian Kinerja tersebut, Deputi Bidang Koordinasi Kedaulatan Maritim dan Energi telah membuat Perjanjian Kinerja dengan para Pejabat Eselon II di Asisten Deputi Hukum dan Perjanjian Maritim, Asisten Deputi Keamanan dan Ketahanan Maritim, Asisten Deputi Delimitasi Zona Maritim dan Kawasan Perbatasan, Asisten Deputi Navigasi dan Keselamatan Maritim, Asisten Deputi Energi, maka kami menyusun Rencana Aksi kinerja Deputi Bidang Koordinasi Kedaulatan Maritim dan Energi. Rencana aksi yang telah disusun tersebut menghubungkan antara rencana *outcome* yang ada dalam perjanjian kinerja dengan kegiatan yang ada dalam draf Perjanjian Kinerja tahun 2020.

Dengan demikian, diharapkan rencana aksi kinerja tahun 2020 menjadi acuan bagi Pejabat Eselon II di Deputi Bidang Koordinasi Kedaulatan Maritim dan Energi dalam menjalankann aktivitasnya.

Jakarta, Januari 2020  
Deputi Bidang Koordinasi Kedaulatan Maritim dan Energi

Purbaya Yudhi Sadewa

## RENCANA AKSI KINERJA SEKRETARIS KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG KEMARITIMAN

KODE SS	SASARAN STRATEGIS	KODE IKU	INDIKTOR KINERJA UTAMA/KEGIATAN	TARGET TAHUNAN	ANGGARAN	KETERANGAN				KETERANGAN
						I	II	III	IV	
SS.1	Terwujudnya Kedaulatan Indonesia sebagai Negara Maritim dengan Berperan Aktif di Tingkat Regional dan Global	IKU.1 Persentase inisiasi gagasan Indonesia yang diusulkan dan/atau diterima di forum dan fora Internasional		70%					70	Seluruh Asisten Deputi
		1	Inisiasi Gagasan Indonesia yang diusulkan dan/atau diterima di forum dan fora Internasional							
SS.2	Terwujudnya keamanan, ketahanan, dan keselamatan maritim	IKU.2 Tingkat keamanan, ketahanan, dan/atau keselamatan maritim		60 %					60%	Seluruh Asisten Deputi
		1	Tingkat keamanan, ketahanan, dan/atau keselamatan maritim							
SS.3	Terwujudnya ketahanan energi nasional	IKU.3 Indeks ketahanan energi nasional		6-7,99					6-7,99	Asisten Deputi Energi
		1	Ketahanan Energi Nasional							
SS.4	Meningkatnya peran aktif dalam penerapan hukum dan perjanjian maritim untuk menjaga kedaulatan maritim	IKU.4 Persentase penerapan dan inisiasi gagasan Indonesia bidang hukum dan perjanjian maritim		70%					70%	Asisten Deputi Hukum dan Perjanjian Maritim
		1	Inisiasi gagasan Indonesia bidang hukum dan perjanjian maritim							

SS.5	Terwujudnya Layanan Hukum dan Organisasi	IKU.5 Tingkat keamanan dan ketahanan maritim		60%					60%	Asisten Deputi Keamanan dan Ketahanan Maritim	
		1	Tingkat keamanan dan ketahanan maritim								✓
SS.6	Terwujudnya keamanan dan ketahanan maritim Indonesia	IKU. 6 Tingkat kepastian kewilayahan Indonesia		60%					60%	Asisten Deputi Delimitasi Zona Maritim dan Energi	
		1	Tingkat kepastian kewilayahan Indonesia								✓
SS.7	Terwujudnya keselamatan maritim Indonesia	IKU.7 Tingkat keselamatan maritim di Indonesia		50%					50%	Asisten Deputi Keselamatan dan Navigasi Maritim	
		1	Tingkat keselamatan maritim di Indonesia								✓
SS.8	Meningkatnya Ketahanan energi	IKU.8 Tingkat ketahanan energi		6-7,99					100%	Asisten Deputi Energi	
		1	Tingkat ketahanan energi								✓
SS.9	Efektivitas Rancangan Kebijakan Bidang Koordinasi Kedaulatan Maritim dan Energi	IKU.9	Persentase Rancangan Kebijakan di Bidang Kedaulatan Maritim yang menjadi Kebijakan di Bidang Kemaritiman dan Investasi	100%					100%	Seluruh Asisten Deputi	
			a. Rekomendasi Kebijakan Penyusunan Rencana Aksi Kebijakan Kelautan Indonesia Tahap 2 Periode 2020- 2024								✓
			b. Rancangan Koordinasi Pengendalian Kebijakan								✓

			Nasional terkait Submisi Landas Kontinen di Luar 200 NM di Selatan Pulau Sumbawa dan Pantai Barat Sumatera							
			c. Rancangan Kebijakan Partisipasi Indonesia dalam Pengelolaan Laut Bebas dan Dasar Laut Internasional							✓
			d. Rancangan Kebijakan Pelibatan Masyarakat Dalam Penjagaan Wilayah Negara di Daerah Pesisir dan Pulau Pulau Kecil (WP3K)							✓
			e. Rancangan Kebijakan AIS Forum							✓
			f. Rancangan Koordinasi Pengendalian Kebijakan kerjasama Implementasi Perpres 35/2018 (PSEL)							✓
			g. Rancangan Kebijakan Optimasi Produksi Migas							✓
			h. Rancangan Kebijakan Akselerasi Investasi dan Pengembangan Energi Baru Terbarukan							✓

		IKU.10 Persentase Rekomendasi Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kedaulatan Maritim dan Energi yang Dilaksanakan	100%							
		a. Rancangan Rekomendasi Pengendalian Pelaksanaan Perjanjian Bilateral di Bidang Kemaritiman							✓	
		b. Rancangan Rekomendasi Pengendalian Pelaksanaan Kesepakatan Bersama 8 (delapan) Kementerian/Lembaga tentang Pertukaran Data dan Informasi dalam rangka Penegakan Hukum di Laut							✓	
		c. Rancangan Rekomendasi Pengendalian Tindak Lanjut hasil kajian GAP Analisis Perundang-Undangan Nasional terhadap Ketentuan UNCLOS							✓	
		d. Rancangan Rekomendasi Pengendalian Penanganan Pembongkaran ( <i>Decomisioning</i> ) Anjungan Pengeboran Minyak dan Gas di Pantai/Lepas Pantai							✓	

		e. Rancangan Rekomendasi Pengendalian Persiapan dan Pelaksanaan Penerapan TSS Selat Sunda dan Selat Lombok						✓	
		f. Rancangan Kebijakan Pengendalian Kebijakan Realignment <i>Flight Information Region</i> (FIR)						✓	
SS.10	Tersedianya SDM yang Kompeten di Deputi Bidang Koordinasi Kedaulatan Maritim dan Energi	IKU.11 Persentase Pejabat Deputi Bidang Kedaulatan Maritim dan Energi yang Sesuai Kompetensi	80%					80	
		Pejabat Deputi Bidang Kedaulatan Maritim dan Energi Sesuai Kompetensi						✓	
SS.11	Terwujudnya RB yang Efektif di Deputi Bidang Koordinasi Kedaulatan Maritim dan Energi	IKU.12 Nilai Evaluasi Internal SAKIP Deputi	70			100%			Sekretariat Deputi Bidang Koordinasi Kedaulatan Maritim dan Energi
		IKU.13 Nilai PMPRB Deputi	60						
SS.12	Terlaksananya Administrasi Keuangan yang Akuntabel di Deputi Bidang Koordinasi Kedaulatan Maritim dan Energi	IKU.14 Nilai IKPA Deputi	70						